



Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia is licensed under
A Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License

Analisis Persepsi Guru Sekolah Dasar terhadap Muatan Pelajaran PPKn di Kecamatan Situbondo

Afif Amroellah¹⁾, Putu Eka Suarmika²⁾, Erdi Guna Utama³⁾

¹⁾ *Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, Jawa Timur*
E-mail: fief01.amroellah@email.com

²⁾ *Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, Jawa Timur*
E-mail: eka.suarmika@gmail.com

³⁾ *STKIP Singkawang, Kalimantan Barat*
E-mail: erdi.guna.utama@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi guru dalam pembelajaran PPKn pada Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Situbondo dengan responden sebanyak 41 guru dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian: 1) Persepsi guru tentang pembelajaran PPKn hanya memahami tentang dimensi nilai-nilai Pancasila dan nilai karakter. Hal ini tidak terlepas dari penerapan kurikulum 2013 yang lebih menekankan tentang pendidikan karakter. Jadi pemahaman guru tentang PPKn adalah pembelajaran tentang nilai-nilai karakter, 2) Belum terlihat pemahaman guru tentang dimensi pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan. Artinya pemahaman guru tentang PPKn hanya sebatas hafalan bukan mengajarkan untuk terampil berpikir kritis, sebagai problem solving dan bagaimana mengajarkan untuk menjadi warganegara yang baik.

Kata Kunci: Persepsi guru; PPKn; Sekolah Dasar

I. PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat manusia makin maju dengan ditemukannya sains dan teknologi oleh manusia untuk menjawab segala permasalahan kehidupan yang dihadapinya. Makin majunya perkembangan masyarakat manusia, kebutuhan dan tuntutan kehidupan makin terdiferensiasi dan terspesifikasi, sehingga sangat memungkinkan memunculkan kehidupan yang cenderung individual yang berbasis pada kebutuhan material, yang secara pelan tapi pasti menyebabkan terjadinya kehidupan masyarakat yang cenderung menonjolkan egoisme ekstrim kelompok dan atau pribadi [1].

Sebagai mata pelajaran yang memiliki dimensi pendidikan moral di sekolah, PPKn mengemban misi untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizenship*), sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Salah satu unsur penting warga negara yang baik adalah memiliki dan menumbuhkembangkan karakter sesuai dengan budaya bangsa, sehingga dia akan dapat mengambil peran dalam melakukan pembangunan masyarakat.

Pembelajaran PPKn pada kurikulum 2013 memiliki misi *smart and good citizenship, character building* merupakan misi penting dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah. Mata pelajaran PKn terkait langsung dengan penanaman nilai. Bahkan mata pelajaran ini

memiliki muatan tanggung jawab internalisasi nilai lebih besar dibandingkan dengan materi pelajaran lainnya. Dengan jargon *civic intelligence*, PKn mengharapkan terbinanya peserta didik yang memiliki kepekaan kewarganegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. *Civic intelligence* menjadi pincang manakala mengabaikan di dalamnya tentang pembangunan karakter [2].

Guru memiliki posisi yang penting dalam proses pembelajaran, terutama dalam membentuk moral dan karakter siswa. Keberhasilan guru dalam melaksanakan pembelajaran tidak bisa dilepaskan dari persepsi guru tersebut terhadap mata pelajaran yang akan diajarkan. Menurut referensi [3], persepsi adalah proses menafsirkan informasi tentang orang lain. Dari makna persepsi jelas bahwa semua persepsi dapat bergantung pada informasi yang diterima. Bagaimana menginterpretasikan informasi menjadi informasi yang benar. dengan kata lain, meskipun informasi yang diterima adalah sama, tetapi tetap, cara interpretasi orang tersebut bervariasi berdasarkan kapasitas cara menafsirkannya

Hasil penelitian referensi [4] menemukan terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara guru dengan usia yang berbeda dalam hal melihat peran pendidikan kewarganegaraan dan hak asasi manusia di sekolah. Guru yang lebih tua cenderung menghubungkan pendidikan kewarganegaraan lebih banyak dengan kegiatan

ekstra kurikuler daripada rekan mereka yang lebih muda yang berpikir bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat diajarkan melalui program formal.

Hasil kajian Haq, Prantiasih dan Awaliah, persepsi guru mengenai perencanaan pembelajaran dalam Kurikulum 2013 mencapai 75,71% dan dikategorikan sangat baik; persepsi guru mengenai materi PPKn dalam Kurikulum 2013 mencapai 80,625%, dikategorikan sangat baik; persepsi guru mengenai KBM dalam Kurikulum 2013 sebesar 71,07% dikategorikan baik; dan persepsi guru mengenai evaluasi pembelajaran dalam Kurikulum 2013 mencapai 55%, dikategorikan baik. Secara umum persepsi guru PPKn SMP di Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan Kurikulum 2013 mencapai angka 71,2% sehingga dikategorikan baik.

Berdasarkan uraian di atas maka dirasa perlu untuk mengetahui bagaimana persepsi guru dalam pembelajaran PPKn pada Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar.

II. METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif karena hasil penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa statement tertulis yang diperoleh dalam pencarian data dari sumber data yang memberikan gambaran tentang peristiwa atau fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat ilmiah ataupun rekayasa manusia, dan lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo. Dengan sampel sebanyak 41 guru, menggunakan teknik *purposive sampling*. Subjek sampel merupakan guru-guru berpredikat PNS atau guru tetap yayasan dan memiliki masa kerja 5 tahun lebih.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan memberikan pertanyaan kepada Guru "Apa pendapat Anda pembelajaran PPKn?" dan diminta memberikan tanggapan mereka dalam bentuk tertulis. Tidak ada batasan yang ditetapkan untuk tanggapan guru sehingga mereka bisa merasa lebih rileks dalam mengekspresikan pendapat mereka dengan bebas.

Untuk menganalisis hasil respon Guru, digunakan sebuah metode yakni metode analisis isi/konten. Menurut referensi [5] mendefinisikan analisis isi sebagai rangkuman dan penjelasan dari pesan yang disampaikan dalam data yang telah dikumpulkan. Tahapan yang dilalui untuk menganalisis data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut: (1) membaca tanggapan guru dan dilakukan pencatatan ulang, (2) pembuatan kode berdasarkan data dan pelabelan teks, (3) melakukan kegiatan konfirmasi data antar penilai (4) pembuatan tema berdasarkan kode yang disepakati, (5) penyajian dan interpretasi data penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis wawancara tentang pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar Kecamatan Situbondo diadapat hasil; *Pertama*, seluruh responden memberikan pernyataan bahwa PPKn adalah pembelajaran untuk mengajarkan nilai terutama Pancasila dan karakter.

Responden 1:

"Pembelajaran PPKn di sekolah dasar adalah mengembangkan dan melestarikan nilai luhur Pancasila dan nilai moral budaya bangsa yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang dimulai atau ditanamkan sejak usia dini atau tahap sekolah dasar. Pembelajaran ini menitik beratkan pada kompetensi yang akan dituju yaitu siswa dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghargai sesama teman, saling membantu walau pun mereka berbeda agama, suku, bahasa dan budaya, bersikap adil, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dengan melaksanakan musyawarah"

Responden 22 :

"Pembelajaran PPKn memiliki peranan penting yaitu dalam pembentukan sikap siswa maupun perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari, serta membentuk warga negara yang cerdas, terampil, berakhlak yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Maka, dari itu pembelajaran PPKn ini mencakup materi tentang moral. di sekolah dasar yang menjadi fondasi dasar pembentukan siswa, sehingga diharapkan menjadi pribadi yang baik"

Pendapat yang sama, pada responden 41:

"PPKn adalah pembelajaran yang sangat penting karena menekankan pada pengembangan nilai, moral dan sikap perilaku siswa dengan harapan dapat menjadi warga negara Indonesia yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila"

Temuan ini sejalan dengan hasil kajian referensi [6] bahwa, peran guru PPKn dalam membentuk karakter siswa kelas V SD Inpres Ende 7 yaitu: sebagai sosok yang memegang amanah, sebagai sosok yang memberi teladan, sebagai sosok yang mendidik dengan hati membangun sebuah motivasi. Melalui pembelajaran PPKn diharapkan para siswa: Pertama, untuk memahami dan menguasai logika konsep dan norma Pancasila sebagai filosofi, ideologi dasar, dan pandangan hidup Republik Indonesia. Kedua, literasi konstitusi, yaitu UUD (Undang-Undang Dasar atau Konstitusi) 1945, dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Ketiga, hidup dan percaya pada tatanan moral yang terkandung di atas. Keempat, praktikkan dan standarisasi hal-hal di atas sebagai sikap perilaku-diri dan kehidupan dengan penuh keyakinan dan akal [7].

Ruang lingkup materi mata pelajaran PPKn di sekolah dasar dalam referensi [8] adalah: Kandungan moral Pancasila dalam Lambang Negara, Bentuk dan tujuan norma/kaidah dalam masyarakat, Semangat kebersamaan dalam keberagaman, Persatuan dan kesatuan bangsa, Makna simbol-simbol Pancasila dan lambang negara Indonesia. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warganegara. Makna keberagaman personal, sosial, dan kultural. Persatuan dan kesatuan, Moralitas sosial dan politik warga negara/ pejabat negara, dan tokoh masyarakat, Nilai dan moral Pancasila, Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warganegara, Keanekaragaman sosial dan budaya dan pentingnya

kebersamaan, Nilai dan moral persatuan dan kesatuan bangsa, Moralitas terpuji dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru, hanya 2 responden memiliki persepsi tentang pengetahuan kewarganegaraan. Referensi [9] menyatakan pengetahuan kewarganegaraan adalah sikap dan perilaku yang diadopsi menuju pengetahuan dimana seseorang secara aktif menampilkan perilaku berbagi pengetahuan, manajemen pengetahuan pribadi dan tanggung jawab untuk terlibat dalam pembelajaran seumur hidup.

Responden 15:

“Kita dapat belajar mengenai rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia dan dapat mengamalkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Di kehidupan sehari-hari kita menjadi tau hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang akhirnya membuat kita menjadi mengerti peran dan penempatan diri kita sebagai bagian dari suatu negara. Dengan mempelajari pelajaran PPKn dapat memotivasi kita untuk memiliki sifat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Diharapkan memiliki kesadaran dan kemampuan awal dalam usaha bela Negara”

Responden 16:

Pendidikan kewarganegaraan merupakan komponen penting dari pendidikan yang memupuk warga untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik demokrasi, untuk menggunakan hak mereka dan untuk melepaskan tanggung jawab mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan [10].

PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) pada kurikulum tahun 2013 meliputi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa; UUD 1945 sebagai dasar hukum yang menjadi dasar konstitusional kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara; Bhineka Tunggal Ika (Kesatuan dalam Keberagaman) sebagai manifestasi keragaman masyarakat, bangsa, dan negara dalam keragaman yang kohesif dan utuh; dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara Indonesia [7].

Artinya misi PPKn dalam pembelajaran di Sekolah Dasar, membangun dan membentuk kesadaran tentang sebagai warga Negara yang baik. Referensi [11] menyatakan PPKn di Indonesia memiliki makna filosofis dalam mempersiapkan warga negara yang beradab dan bijaksana, hal ini dikarenakan dalam kurikulum PPKn dalam perkembangannya sendiri memiliki makna filosofis pelbagai penentu watak warganegara yang taat hukum yang seimbang antara hak dan kewajiban, sebagai pembentuk nilai, moral dan akhlak bangsa dalam mempersiapkan mental multikultural warga Negara.

Ketiga, Yaitu dimensi keterampilan kewarganegaraan (*civics skills*) meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya: berperan serta aktif mewujudkan masyarakat madani (*civil society*), keterampilan mempengaruhi dan monitoring jalannya pemerintahan, dan proses pengambilan keputusan politik, keterampilan memecahkan masalah-masalah sosial, keterampilan mengadakan koalisi, kerja sama, dan mengelola konflik. Hanya 2 responden yang

memiliki pemahaman tentang keterampilan kewarganegaraan.

Responden 31:

“Pembelajaran PPKn di SD bertujuan agar siswa dapat berpikir kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isi kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan juga memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara yang cerdas dan berkarakter”

Responden 32:

“Mengembangkan misi sebagai pendidikan politik demokrasi dalam rangka membentuk warga negara yang kritis, partisipatif, dan bertanggungjawab bagi kelangsungan bangsa dan Negara” [12].

Referensi [13] merekomendasikan pengkategorian keterampilan sipil (*civics skills*) yang penting ke dalam kategori berikut: 1) keterampilan komunikasi (baik mengekspresikan dan memahami fakta dan opini), 2) musyawarah demokratis / pengambilan keputusan kolektif, dan 3) analisis kritis terhadap informasi politik. Tiga dimensi yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), dimensi keterampilan (*civic skills*), dan dimensi nilai (*civic values*). Ketiga dimensi ini secara sinergis membangun *core* dari PPKn yaitu warga negara yang berpengetahuan, terampil, dan berkepribadian. Dimensi [2].

Pembelajaran PPKn di sekolah dasar merupakan pembelajaran yang mengajarkan norma, nilai dan moral, mengajarkan siswa tentang aturan-aturan yang berlaku mulai dari aturan hidup di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Pembelajaran PPKn di sekolah dasar bertujuan agar siswa menyadari bahwa di samping ada kebebasan juga ada aturan yang membatasi hak dan kewajiban seseorang.

Nilai akan memberikan kontribusi rasa percaya diri dan komitmen dari warga negara, dimensi keterampilan kewarganegaraan memberikan kontribusi terbangunnya komitmen dan kompetensi kewarganegaraan, sedangkan dimensi pengetahuan kewarganegaraan akan memberikan kontribusi tumbuh kembangnya kompetensi dan rasa percaya diri.

Sisi praktis dari pendidikan kewarganegaraan yang baik dapat dikembangkan di sekolah karena merupakan miniatur hidup dalam masyarakat, kondisi dan masalah dalam masyarakat yang lebih besar lebih mudah direproduksi dan dipecahkan dalam pembelajaran di kelas 1.

IV. KESIMPULAN

1. Persepsi guru tentang pembelajaran PPKn hanya memahami tentang dimensi nilai-nilai Pancasila dan nilai karakter. Hal ini tidak terlepas dari penerapan kurikulum 2013 yang lebih menekankan tentang pendidikan karakter. Jadi pemahaman guru tentang PPKn adalah pembelajaran tentang nilai-nilai karakter.
2. Belum terlihat pemahaman guru tentang dimensi pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan. Artinya pemahaman guru tentang PPKn hanya sebatas hafalan bukan mengajarkan untuk terampil berpikir

kritis, sebagai *problem solving* dan bagaimana mengajarkan untuk menjadi warga negara yang baik.

Penelitian ini hanya mendeskripsikan persepsi guru terhadap pembelajaran PPKn, perlu dilakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi guru.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dantes. N. (2014). *Landasan Pendidikan Tinjauan Dari Dimensi Makropedagogis*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- [2] Masrukhi. 2016. *Revitalisasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pembangun Karakter Melalui Pemberdayaan Kultur Sekolah*. <https://www.researchgate.net>.
- [3] PirsI, E., Stimac, M. O, Bulian, A. P. 2007. *The Attitudes Of Students And Teacher Toward Civic Education And Human Rights*. <https://www.researchgate.net/.../233729503>.
- [4] Zulhernanda, Windha., 2018, *Teachers' Perceptions on Application Of 2013 Curriculum for Elementary School in Medan*, *Advances in Language and Literary Studies*, <http://dx.doi.org/10.7575/aiac.all.v.9n.1p.62>.
- [5] Haq, Manik Nur., Prantiasih, Arbaiyah dan Awaliyah, Siti., *Persepsi Guru PPKN SMP Dalam Melaksanakan Kurikulum 2013 Di Kabupaten Bontowoso*, <http://jurnal-online.um.ac.id>.
- [6] Bego, Karolus Charlaes., 2016, *Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Siswa Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Siswa*, *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, <https://media.neliti.com>.
- [7] Komara, Endang. (2017). "Curriculum and Civic Education Teaching in Indonesia" in *EDUCARE: International Journal for Educational Studies*, Volume 10(1), August, pp.23-32. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press owned by ASPENSI, ISSN 1979-7877, www.mindamas-journals.com.
- [8] Kemendikbud . 2016. *Permendikbud 21 Tahun 2016 tentang Standar Proses Sekolah Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- [9] Sutton, Melanie., 2008, *Knowledge citizenship for active informed citizenship*, *South African Journal of Information Management*, <http://www.sajim.co.za>.
- [10] Syvertsen, A.K., Flanagan, C.A., and Stout, M.D. (2007). *Best practices in civic education: Changes in students' civic outcomes (CIRCLE Working Paper No. 57)*. Medford, MA: the Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement. Retrieved March 30, 2010, <http://www.civicyouth.org/PopUps/WorkingPapers/WP57Flanagan.pdf>.
- [11] Wibowo, Arif Prasetyo dan Wahono, Margi., 2017, *Pendidikan Kewarganegaraan: usaha konkret untuk memperkuat multikulturalisme di Indonesia*, *Jurnal Civics Volume 14 Nomor 2*, <https://www.researchgate.net>.
- [12] Kirlin, M. (2003). *The role of civic skills in fostering civic engagement. (CIRCLE Working Paper No. 6)*. Medford, MA: the Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement. Retrieved March 30, 2010, <http://www.civicyouth.org/PopUps/WorkingPapers/WP06Kirlin.pdf>.